

**ORIENTASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KOTA PADANG
DALAM PROSES REVISI PERATURAN DAERAH NO. 24 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

Rafin Chaniago



PEMBIMBING

Dr. Asrinaldi, M. Si

Dewi Anggraini, S. IP, M. Si

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

ABSTRAK

Rafin Chaniago. 1310831005. Orientasi dan Kepentingan Politik Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang dalam Proses Revisi Peraturan Daerah No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2018. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Dr. Asrinaldi, M. Si dan Pembimbing 2 Dewi Anggraini, S.IP, M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya proses revisi tentang Perda No. 24 tahun 2012 di Kota Padang terkait pelarangan iklan rokok. Awal munculnya isu revisi ini adanya permintaan dari Pemerintah Kota bersama Walikota Padang agar Perda ini direvisi terkait pelarangan iklan rokok. Hasil dari revisi tersebut ada tujuh fraksi yang menolak dan hanya dua fraksi yang menerima, peneliti tertarik melihat adanya orientasi dari masing-masing fraksi ini terhadap partai politik yang mengusungnya, karena hasil dari fraksi-fraksi yang menolak dan menerima sesuai dengan partai-partai yang mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Juli 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pola hubungan orientasi dan kepentingan politik Abcarian dan Masannat yang meliputi *the representative as a trustee*, *the representative as a delegate*, *the representative as politico* dan *the representative as a partisan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mayoritas dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang dalam proses perumusan revisi Perda kawasan tanpa rokok ini selain memiliki orientasi kepada aspirasi masyarakat yang diwakili, ternyata ada hal lain dibelakangnya yaitu memiliki orientasi kepada partai yang mengusungnya, baik dari fraksi yang menerima maupun menolak. Hal ini terlihat dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang mayoritas menolak revisi Perda ini seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan Golkar memang berorientasi mengikut Partai yang mengusungnya karena melihat revisi Perda ini merupakan suatu bentuk pencitraan dari Walikota sendiri. Dan sebaliknya dari fraksi yang menerima PKS dan PAN mereka melihat bahwa fraksi-fraksi yang menolak revisi ini ternyata syarat akan politiknya, dimana Perda ini jika diterima akan melambungkan suara Incumbent sehingga memuluskan jalannya untuk terpilih lagi, untuk itu mereka memilih menolak revisi Perda kawasan tanpa rokok ini. Dan juga Perda ini berhubungan dengan pemilihan Walikota yang akan berlangsung, sehingga adanya unsur-unsur politik terkait memperlihatkan bentuk dukungan/koalisi dalam revisi Perda ini.

Kata Kunci : Orientasi Politik, Kepentingan Politik, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

ABSTRACT

Rafin Chaniago. 1310831005. Orientation and Political Interest of Regional People's Representative Council Factions in Padang City in the Revision of Regional Regulation No.24 of 2012 concerning about Non-Smoking Areas in Padang City. Political Science Department. Faculty of Social Science and Political Science. Andalas University. Padang. 2018. Supervised by Dr. Asrinaldi and Dewi Anggraini, S.IP, M.Si.

This research is based by the revision process concerning about Regional Regulation No.24 of 2012 in Padang City related to the prohibition of cigarette advertisements. The beginning of this revision issue was from a request by City Government with the Mayor of Padang to revised this regulation especially regarding the prohibition of cigarette advertisements. The results of the revision were seven factions that refused and only two factions accepted, the researchers were interested in seeing the orientation of each of these factions against the political parties that carried them, because the results of the factions that refused and accepted is accordance with the parties who carries candidate pair of Mayor and Deputy Mayor in July 2018. The theory that used in this study is theory of patterns of relationship orientation and political interests of Abcarian and Masannat which include “the representative as a trustee, the representative as a delegate, the representative as politico and the representative as a partisan”. The method that used in this study is a qualitative method with descriptive research type. The technique that used in data collection is through in-depth interviews and documentation. The results of this study show that the majority of the Regional People's Representative Council Factions in Padang City in the process of formulating the revision of the regulation of non-smoking areas besides having an orientation to the aspirations of the people they represented, there were other things behind them, that has orientation to the parties that carried it, both from the faction that received or refused. This can be seen from the factions majority rejecting the revision of this Regional Regulation such as Gerindra, Demokrat, Nasdem, and Golkar, which are oriented towards following the Parties that carried it because they think the revision of this Regional Regulation as an image of the Mayor himself. And from the faction that accepting such as PKS and PAN they think that the factions that reject this revision are the conditions for their politics, where if this regulation is accepted it will inflame the Incumbent vote and smooth the way to be re-elected, that caused they chose to reject the revision of the regulation on this non-smoking areas. And also this Regional Regulation relates to the Mayor's election that will take place, so that the related political elements show the support/coalition in the revision of this Regional Regulation.

Keywords: Political Orientation, Political Interest, Regional People's Representative Council.